



DPRD KOTA YOGYAKARTA
 SUARA WAKIL RAKYAT
 JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

Segera Miliki 'Big Data' Skuter Listrik

YOGYA (KR) - Tren bisnis skuter atau otoped listrik mulai marak. Hal ini menjadi sorotan Komisi B DPRD Kota Yogyakarta yang membidangi masalah perekonomian. Pemkot pun didesak segera memiliki 'big data' tentang skuter listrik.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Yogyakarta R Krisma Eka Putra SE, dalam rapat kerja Komisi B ia menyampaikan ada dua hal yang perlu dipahami dalam menghadapi tren bisnis skuter listrik ini. "Di satu sisi, ini merupakan satu terobosan alternatif fasilitas untuk wisatawan, di sisi lain banyak netizen yang mengeluhkan tentang keberadaannya karena dianggap mengganggu lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, karena sering kali para penye- ugal-ugalan dan tidak men- taati peraturan lalu lintas yang berlaku khususnya di kawasan Tugu, Malioboro dan Titik Nol," urainya.

Berkaitan dengan hal ini, Pemkot perlu member- lakukan peraturan yang jelas. Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45/2020, kendaraan berbasis listrik merupakan kendaraan khusus. Karenanya, kendaraan tersebut harus melin- tas di jalur khusus atau kawasan tertentu.

"Sementara dibuat saja dulu semacam MOU dengan para pelaku usaha. Misalnya, jam berapa boleh berope- rasi, rute yang boleh atau tidak dilalui, batasan jumlah

R Krisma Eka Putra SE
Fraksi Partai Gerindra

KR-istimewa

penyedia jasa di kawasan Tugu, Malioboro dan Titik Nol. Jangan tunggu viral, karena ada kasus yang terjadi dahulu baru dibuat peraturan," tegas- nya.

Krisma menilai, ketika tidak ada peraturan yang jelas sejak awal, jumlah penyedia jasa akan semakin banyak. Jika sudah banyak, akan membentuk komunitas, dan dapat dimungkinkan memiliki keku- atan politik untuk bargaining dengan pemerintah ketika akan ditertibkan di kemudian hari. "Ketika nanti ditertibkan, mere- ka akan meminta relokasi, sia- pa yang rugi? Pemkot dan ma- syarakat Kota Yogya itu sendiri. Karena pasti akan menggu- nakan APBD dalam prosesnya, yang seyogyanya APBD bisa di- maksimalkan di sektor yang lain, seperti pendidikan, kese- hatan dan kesejahteraan sosial," imbuhnya.

Di samping itu, tidak fair rasanya ketika kita baru sa- ja merelokasi PKL, lalu ada unit bisnis lain yang di- jalankan di kawasan Tugu, Malioboro dan Titik Nol tan- pa peraturan jelas. "Mereka kan sama-sama pedagang, cuma jenis dagangannya saja yang berbeda. Jika ada peraturan yang jelas sejak awal, akan mengurangi dampak negatif di kemudian hari. Jadi perkembangan bisnis UMKM itu bagus, tetapi berkembangnya suatu usaha tentu tidak boleh merugikan pihak yang lain," katanya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005